DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, BADAN NARKOTIKA NASIONAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN, DAN KEMENTERIAN ATR/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG STATISTIK

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 28 APRIL 2025

Tahun Sidang	:	2024—2025
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	6
Jenis Rapat	:	Raker/RDP
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 28 April 2025
Waktu	:	Pukul 13.38 WIB s.d pukul 15.33 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) 2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) 4. Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan 5. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 6. Kapokja PUU Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup terhadap penyusunan RUU tentang Statistik
Ketua Rapat	:	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H.
Hadir	:	- Anggota 54 Orang Hadir, 13 Izin dari 8 Fraksi - Narasumber

1. Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si, M.Sc. (Kepala Badan Informasi Geospasial)
2. H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc. (Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
3. Irjenpol Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D. (Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional)
4. Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Sc. (Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan)
5. Dr. Yudi Sastro, SP, MP. (Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian)
6. Destrianto Yudo (Kapokja PUU Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup)

I. PENDAHULUAN.

1. Raker/RDP Badan Legislasi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.38 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Statistik.

II. KESIMPULAN.

Raker/RDP Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik, mengusulkan sebagai berikut:

1. BIG menyatakan bahwa mereka akan menjadi Penyelenggara Statistik Sektoral jika melaksanakan kegiatan yang outputnya adalah data statistik. BIG menekankan pentingnya integrasi data statistik dengan data geospasial dan menyarankan agar pemutakhiran data statistik tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga oleh penyelenggara statistik sektoral dan khusus. BIG juga menyoroti perlunya platform untuk diseminasi data statistik dan perlindungan data statistik, termasuk infrastruktur dan data digital.

2. Kementerian ATR/BPN setuju dengan penguatan koordinator statistik nasional dan menekankan pentingnya sistem yang interoperabilitas. Kementerian ATR/BPN juga menyoroti pentingnya pemisahan fungsi teknis dan pengawasan statistik untuk memastikan data yang baik yang dapat mendukung kebijakan yang baik.

3. BNN menekankan pentingnya data yang valid, asli, dan terkini dari BPS. BNN menjelaskan bahwa sejak awal, BNN telah memproduksi data bersama BPS dan peta, sehingga data yang dihasilkan sudah valid. BNN mengadakan survei prevalensi setiap dua tahun yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk pembuatan kebijakan. BNN mendukung integrasi data spasial dengan data statistik untuk memastikan data yang akurat dan relevan.

4. Kementerian Kehutanan setuju dengan konsep satu data BPS dan menekankan pentingnya alokasi hutan lindung yang akurat. Kementerian Kehutanan juga menyarankan agar pemutakhiran data dilakukan dengan cepat dan akurat untuk mendukung kebijakan yang baik.

5. Kementerian Pertanian setuju dengan konsep satu data BPS dan idealnya sensus dilakukan setiap 3 tahun sekali, namun karena biaya yang besar, dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan catatan ada survei antara. Kementerian Pertanian tetap berperan sebagai produsen data dan mendukung RUU tentang Statistik untuk memastikan data yang akurat dan relevan.

6. Kementerian Lingkungan Hidup setuju dengan konsep satu data BPS dan menekankan pentingnya data yang selaras sampai tingkat kabupaten. Kementerian Lingkungan Hidup mendukung RUU tentang Statistik untuk memastikan data yang akurat dan relevan untuk mendukung kebijakan lingkungan hidup.

7. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg.

8. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik

III. PENUTUP.

Raker/RDP Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik ditutup pukul 15.33 WIB.

Jakarta, 28 April 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN SEKERETARIAT
BADAN LEGISLASI

Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H.